

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI  
DENGAN SEKJEN MAHKAMAH KONSTITUSI,  
SEKJEN KOMNAS HAM, SEKJEN DPD DAN KETUA LPSK**

-----

**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2013-2014
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Hari/tanggal	: Rabu, 4 September 2013.
Waktu	: Pukul 10.30 – 13.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat	: Gede Pasek Suardika, SH, MH / Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH, M.Si / Kabagset. Komisi III DPR RI.
Hadir	: 23 orang dari 51 anggota Komisi III DPR RI.
Ijin	: 08 orang anggota Komisi III DPR RI.
Acara	: Pembahasan RKAK/L TA 2014

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dalam rangka Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2014 dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi III, Gede Pasek Suardika, SH, MH dengan agenda sebagaimana tersebut diatas.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

Hal-hal yang disampaikan oleh Sekjen Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

- 1. Perkembangan penanganan perkara Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 4 September 2014**  
Jumlah perkara yang masuk sampai dengan tanggal 4 September 2013 sebanyak 265 perkara. Dari 265 perkara, telah diputus sebanyak 189 atau 71,3% dan dalam proses pemeriksaan persidangan sebanyak 76 perkara atau 28,7%. Dari 265 perkara, berdasarkan jenis perkaranya maka dapat diketahui bahwa perkara Pengujian Undang-Undang sebanyak 150 perkara atau 56,7%. Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara sebanyak 3 perkara atau 1,1%. Dan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebanyak 112 perkara atau 22,3%.
- 2. Realisasi program kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013 adalah sebesar Rp116.565.243.035,00 atau ekuivalen dengan 58,54%**
- 3. Pagu anggaran Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2014**  
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga dan Langkah-Langkah Penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2014, MK Mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.188.977.249.000 yang dialokasikan ke dalam empat program, sebagai berikut.

**Tabel**  
**Pagu Anggaran Per Program TA 2014**

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI	66.183.906.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.014.700.000
3	Program Penanganan Perkara Konstitusi	86.778.643.000
4	Program Kesadaran Berkonstitusi	0
	<b>Jumlah</b>	<b>188.977.249.000</b>

Di samping itu, berdasarkan jenis belanja, dapat diperinci dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

**Tabel**  
**Perbandingan Pagu Anggaran Per Belanja  
TA 2013 dan TA 2014**

NO.	URAIAN BELANJA	PAGU APBN-P 2013 (Rp)	PAGU ANGGARAN 2014 (Rp)
1	Belanja Pegawai	14.155.748.000	13.791.149.000
2	Belanja Barang	148.653.182.000	139.171.400.000
3	Belanja Modal	36.300.000.000	36.014.700.000
	<b>Jumlah</b>	<b>199.108.930.000</b>	<b>188.977.249.000</b>

4. Apabila pagu anggaran MK TA 2014 dibandingkan dengan anggaran MK TA 2013, maka dapat diketahui bahwa anggaran MK untuk TA 2014 turun sebesar Rp10.131.681.000,00 atau *equivalen* dengan 5,08%
5. Pada Tahun 2014 prioritas program MK adalah program penanganan perkara konstitusi khususnya perkara perselisihan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serta kegiatan-kegiatan turunannya. Pada RDP tersebut, MK mengusulkan penambahan pagu anggaran, agar pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi dan pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar, adil, dan bermartabat. Berikut ini adalah usulan tambahan pagu anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2013 :

**Tabel**  
**Pagu Anggaran dan Kebutuhan Anggaran  
Mahkamah Konstitusi TA 2014  
Per Program**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Usulan Tambahan Anggaran (Rp.)	Kebutuhan Anggaran (Rp.)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI	66.183.906.000	54.387.634.000	120.571.540.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MKRI	36.014.700.000	0	36.014.700.000
3	Penanganan Perkara Konstitusi	86.778.643.000	16.897.502.000	103.676.145.000
4	Kesadaran Berkonstitusi	0	17.175.000.000	17.175.000.000
	JUMLAH	188.977.249.000	88.460.136.000	277.437.385.000

#### 6. Asumsi Penanganan Perkara TA 2014

No	Jenis Perkara	Keterangan	Perkara
1	PHPU DPR & DPRD	15 dapil x 12 parpol	180
2	PHPU DPRA dan DPRK di Aceh	8 dapil x 3 parpol lokal	24
3	PHPU DPD	1 dapil x 33 provinsi	33
4	PHPU Presiden & Wapres	2 perkara	2
5	PHPU Kada	40 perkara	40
6	PUU	10 perkara x 8 bulan	80
7	SKLN	3 perkara	3
		JUMLAH PERKARA	362

#### Hal-hal yang disampaikan oleh Sekjen DPD, sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.258 / KMK.02 / 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Langkah-langkah penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2014, Pagu Anggaran DPD Tahun 2014 adalah sebesar Rp.721.341.371.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  - Penguatan kelembagaan DPD RI dalam sistem demokrasi sebesar Rp.254.900.000.000,-
  - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya DPD RI sebesar Rp.326.441.371.000,-
  - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI sebesar Rp.140.000.000.000,-
- Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Urusan Rumah Tangga DPD dan persetujuan Pimpinan DPD RI, DPD mengusulkan tambahan anggaran tahun 2014 sebesar Rp.374.500.000.000,- untuk program / kegiatan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan fungsi legislasi DPD dan pengawasan DPD sebesar Rp.146.400.000.000,-
  - Kegiatan pencarian data / fakta atas permasalahan daerah dan pengaduan aspirasi masyarakat dan daerah yang sifatnya mendesak dan harus segera ditindaklanjuti Rp.2.000.000.000,-
  - Sosialisasi dan publikasi DPD sebagai bentuk akuntabilitas DPD Tahun 2009-2014 sebesar Rp.42.500.000.000,-
  - Agenda Ketatanegaraan pada Tahun 2014 sebesar Rp.17.600.000.000,-
  - Pembentukan kantor DPD di ibukota Provinsi sebesar Rp.66.000.00.000,-

#### Hal-hal yang disampaikan oleh Ketua LPSK, sebagai berikut :

- Pagu anggaran Satker LPSK Tahun 2014 adalah sebesar Rp.66.602.451.000,-
- Prioritas kegiatan LPSK diarahkan pada tiga hal, yaitu :
  - Pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian perlindungan saksi dan korban
  - Penguatan manajemen internal dan pengembangan kelembagaan
  - Peningkatan kerjasama antar lembaga baik di tingkat nasional

- Penguatan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban.
3. Target output tahun anggaran 2014, sebagai berikut :
- Pemberian perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana terhadap 200 orang
  - Layanan perkantoran untuk 12 bulan layanan
  - Pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 2 unit
  - Perangkat pengolah data dan komunikasi sejumlah 2 unit
  - Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dengan target output 1 unit / jenis pekerjaan pengadaan
  - Biaya jasa konsultasi perencanaan detail gedung . bangunan seluas 4900 m2

**Hak-hal yang disampaikan oleh Sekjen Komnas HAM, sebagai berikut :**

1. Komnas HAM hanya memiliki satu program, yaitu “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”.
2. Komnas HAM mendapatkan anggaran sebesar Rp.68.660.601.000,- Dan Program Komnas HAM dituangkan dalam 5 kegiatan prioritas, sebagai berikut :
  - Penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur Negara, sebesar Rp.6.220.800.000,-
  - Peningkatan penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebesar Rp.14.367.100.000,-
  - Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban, sebesar Rp.9.133.500.000,-
  - Pengembangan perencanaan dan kerjasama Komnas HAM sebesar Rp.6.583.269.000,-
  - Peningkatan pelayanan umum Komnas HAM sebesar Rp.32.355.932.000,-

**Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan, sebagai berikut :**

**1. MAHKAMAH KONSITUSI**

- Menurutnya, Dulu anggaran **Program Kesadaran Berkonstitusi** Rp.0 dikarenakan Nomenklatur kegiatan yang terdapat pada program tersebut bertabrakan dengan 4 Pilar MPR, dimana arti penting Pancasila sudah masuk di 4 Pilar. Sehingga menyarankan agar **nomenklaturnya diganti**.
- Anggaran itu bagaimana merubah kegiatan menjadi Mata Anggaran yang bisa meyakinkan Menkeu ataupun Bappenas dan DPR di anggaran
- Pada prinsipnya semuanya tidak ada masalah, kita setuju aja. Hanya saja memang perlu beberapa nomenklatur kita perkuat atau paling tidak ada klarifikasi atau hasilnya, misalnya dari MK, beberapakali tahun anggaran selalu mengajukan sosialisasi atau penguatan berkonstitusi selalu ada program itu. Diruangan itu selalu dipertanyakan benturan atau overlapping dengan sosialisasi 4 pilar mungkin akan kita pahami pada saat misalnya hasil-hasil yang telah Dilakukan oleh MK kesadaran berkonstitusi itu seperti apa dilakukannya, sehingga empat pilar yang kita kukuhkan di MPR ini tidak terjadi benturan. Pada dasarnya memang ini penting semua namun jangan sampai pada prakteknya saling terjadi benturan. 4 pilar semuanya anggota MPR terlibat, kesadaran berkonstitusi informasinya seperti apa juga tidak tahu dan siapa saja yang terlibat.
- Jika Ada permohonan Penambahan untuk kegiatan dalam bentuk apa saja perlu disampaikan target sasaran yang akan dicapai, jadi jelas pada saat dilakukan pembahasan sehingga akan diketahui untuk apa saja tambahan anggaran tersebut.
- Tiap-tiap lembaga perlu menyampaikan target dan sasaran kepada DPR sehingga DPR memiliki tolak ukur nanti mengenai sasaran yang telah dicapai pada saat mitra kerja melaporkan pelaksanaannya.
- Jika bisa, tiap-tiap lembaga perlu memiliki standarisasi berdasarkan kebutuhan pokok misal kantornya bagaimana, kebutuhan personil harusnya bagaimana, sehingga jika mengalami kekurangan, DPR mengetahuinya dan bisa mengukur kegiatan yang dicapai.
- Pada Prinsipnya jika memang ini untuk peningkatan daripada lembaga saya kira tidak masalah, hanya mohon diperjelas, berdasarkan tugas pokok dibutuhkan dukungan apa saja sehingga kedepannya DPR telah mengetahuinya
- Ukuran, Indikator tentang penggunaan anggaran itu hasilnya apa, sasaran dan sebagainya , merupakan hal yang penting, namun selama ini tidak ada sehingga pada saat pengawasan DPR mengalami kesulitan tentang penggunaan anggaran tersebut karena target-target pencapaiannya tidak jelas.
- Mitra kerja Komisi III betul-betul merinci dengan jelas tentang penggunaan anggaran, kegiatannya apa, sasarannya apa, output-nya apa, supaya betul-betul kita bisa melihat dalam penggunaan anggaran tahun anggaran 2013-2014 kalau ada yang kurang apa, supaya ada tolak ukur dalam

konteks pengawasan kita dalam penggunaan anggaran. Kedepan perlu diperbaiki pengajuan RKAKL dari Mitra Kerja Komisi III tidak seperti sebelum-sebelumnya.

- **MK perlu suatu dukungan karena ada agenda politik dan belum tercover dalam anggaran 2014 khususnya untuk masalah pemilu.** Apa yang disampaikan oleh Sekjen MK dengan asumsi-asumsi perkara yang akan masuk lalu kemudian tentang PHPU dsb sangat realistis dan perlu ada antisipasi. Dan saya dari Fraksi Hanura memberikan dukungan, lalu kemudian di 2014 apa lagi ada agenda nasional yang akan kita hadapi, apa itu pemilu legislatif dan pemilu presiden, memang perlu ada antisipasi dari sisi anggaran. Saya mendukung tentang apa yang Anda sampaikan dalam forum rapat ini dan saya kira sangat detail untuk tentang penambahan- Rp16 miliar, ada Rp16 miliar yang disampaikan oleh Pak Sekjen dalam menyangkut masalah pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis, dan program penanganan perkara konstitusi. Saya memberikan dukungan untuk itu
- Antara Kinerja dan Anggaran ini akan bisa berbanding lurus, tunjukan dengan kegiatan-kegiatan besar
- **MK, Sosialisasi di internal partai harus lebih dimaksimalkan** sehingga partai-partai itu **jangan hanya ke pusat, ke daerah juga**
- Dari segi anggaran, MK menghadapi Pilkada yang tidak pernah henti dan terus, setiap Pilkada ujungnya adalah MK. Anggaran yang diajukan oleh **MK saya pikir harus dibantu secara maksimal**
- Anggaran pada focus siklus pembahasan ini adalah Outputnya. Jika dikasih anggaran output yang dikasih itu apa. Sehingga kalau LPSK, Komnasham, MK, dan DPD jika anggarannya dipenuhi semua, kira2 output yang diterima oleh masyarakat secara langsung apa, jaminan rasa keadilan itu akan ada, bisa atau tidak disentuh dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

#### **Penjelasan Sekretaris Jenderal MK**

- Berangkat dari fungsi yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu fungsi ini turunan dari kewenangan dan kewajiban konstitusional Mahkamah, yakni sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*protection of the citizens constitutional rights*). Sehingga, kami mengusulkan nanti ke Bapennas untuk diminta oleh Bapak/Ibu Anggota Komisi III. **Program kesadaran berkonstitusi jika nanti dimungkinkan untuk diubah, kami mengusulkan menjadi menjadi Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.** Sehingga dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan oleh MPR dan oleh Mahkamah. Meskipun, sebenarnya kegiatan yang terdapat di dalam program ini yang sudah kami usulkan perubahannya menjadi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, itu berisi antara lain khususnya untuk tahun 2014 nanti adalah bimbingan teknis atau bimtek hukum acara perselisihan hasil pemilu legislatif dan hukum acara perselisihan hasil pemilu presiden/wakil presiden dan itu termasuk yurisprudensi terkait dengan putusan pengujian Undang-Undang Pemilu maupun perselisihan hasil pemilihan umum yang kita sadari putusan tersebut telah menghasilkan prinsip hukum baru yang harus diketahui oleh peserta dan penyelenggara pemilu. Sehingga dengan demikian, diharapkan nanti persidangan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah ini dapat diselesaikan secara adil, damai, dan bermartabat.

#### **2. Dewan Perwakilan Daerah**

- Terhadap pembangunan gedung DPD saat ini sangat sulit, dikarenakan sedikitnya anggota DPD itu sendiri, dan meminta penjelasan terkait kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya.
- Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Gedung di NTT yang sudah mempunyai tanah bersertifikat, sebaiknya jangan dulu mencari dukungan daerah apabila Komisi III belum menyetujui.
- Mengenai pembangunan gedung DPD di daerah belum dibangun secara permanen, saat ini menggunakan kantor sementara yang dipinjamkan oleh Pemda. Dana operasional perkantoran belum ada, dan apabila di Tahun 2014 belum ada anggarannya, maka kantor di daerah ini akan terhenti operasionalnya.
- Untuk pembangunan gedung DPD di daerah, dari 10 daerah yang menghibahkan tanahnya dan sedang diurus sertifikatnya.
- Pembangunan gedung di daerah saat ini agak sulit, apalagi mendekati pemilu. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya di hlm. 9 sebesar Rp. 326.441.371.000, namun di hlm. 10 sebesar Rp. 346.091.371.000. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI di hlm. 9 sebesar Rp. 140.000.000.000 sedangkan di hlm. 11 sebesar Rp. 120.350.000.000. Mana yang sebenarnya dijadikan acuan karena ini berkaitan dengan angka ?

- Penjelasan DPD bahwa hubungan kerja antara DPD dengan DPR sudah berjalan dengan baik. DPD sudah ikut pembahasan dalam otonomi daerah. Sudah ada surat-surat yang juga direspon oleh DPR. DPD memohon tambahan anggaran sebesar Rp.374.500.000.000 untuk didukung.
- Penjelasan sekjen DPD Bahwa untuk kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI yang digunakan adalah tabel turunan, terjadi perubahan karena ada penambahan anggaran untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Daerah, yaitu pengolahan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah di kantor DPD di ibukota negara serta penyelenggaraan dukungan teknis dan keahlian dpd di dapil serta kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Sekjen DPD RI dan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi.

### 3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

- Anggota Komisi III mendukung penguatan anggaran dari LPSK.
- Bahwa dalam memberikan perlindungan saksi dan korban, selama ini masih terdapat perlakuan diskriminatif, hal ini perlu ditinjau lagi. Dan anggaran LPSK harus sesuai dengan output yang diberikan.
- Terkait dengan kinerja dari LPSK, sistem penyampaian laporan anggaran akan disempurnakan. Akan dilakukan perbaikan untuk laporan, usulan penambahan sebesar Rp.10 miliar.
- Dalam penjelasan yang disampaikan, Pimpinan mempertanyakan, apakah salah ketik, untuk pengadaan operasional roda 4 sebanyak 2 unit di halaman 11 sebesar Rp. 43.437.672.000, seharusnya di halaman 9 sebesar Rp. 370.000.000. Untuk kegiatan ILM dan sosialisai LPSK melalui penyelenggaraan seminar, kenapa tidak dimasukkan dalam target output padahal kegiatan ini masuk dalam pagu anggaran tahun 2014 ? Bagaimana kegiatan untuk memperkuat LPSK di daerah ?
- Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan sebesar 12.381.478.000 dengan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak-hak asasi dan korban dengan anggaran 17.649.799.000 apa bedanya ? Apa perbedaan usulan penambahan anggaran yang 10 miliar pada saat rapat trilateral meeting dengan penyetujuan usulan penambahan anggaran sebesar 5 miliar ?
- Dari anggaran yang diberikan, yang penting output yang akan dihasilkan apa ? Bisa tidak masyarakat dapat merasakan hasilnya ? Perlu sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat terutama di daerah kabupaten/kota. Sosialisasi melibatkan anggota komisi 3, karena anggota merupakan wakil di dapilnya. Harus ada sosialisasi secara massive.
- Penjelasan Ketua LPSK, sistem penyampaian laporan anggaran akan disempurnakan. Di dalam laporan LPSK memang belum tercermin secara rinci, yang disetujui oleh Pemerintah hanya 5 miliar, dari 10 miliar yang diusulkan untuk penambahan anggaran LPSK. Anggaran untuk sewa gedung yang sebelumnya mengajukan anggaran 2014, belum masuk. Begitu juga untuk gaji pegawai belum masuk, termasuk pegawai baru. Juga untuk meningkatkan layanan, misalnya bantuan pemberian medis psikologis, dan furniture gedung untuk gedung yang disewakan, sehingga itu semua belum yang dimasukkan dalam tambahan.
- Akan dilakukan perbaikan untuk laporan, usulan penambahan 10 Miliar, dalam pembahasan anggaran di komisi 3 dengan LPSK bulan Juni sudah disampaikan, tapi bulan Juli ini baru disetujui.
- Untuk sosialisasi, selain tempat dan keterlibatan anggota komisi 3 disambut dengan gembira. Misalnya kegiatan konsultasi publik Revisi UU Nomor 13 Tahun 2006 juga melibatkan anggota komisi 3. Sosialisasi rencana pembentukan LPSK daerah juga akan melibatkan anggota komisi 3. Sosialisasi LPSK untuk 2014 dianggarkan 2.278.940.000 dan terdiri dari 6 kegiatan. Revisi UU Nomor 13 Tahun 2006 mohon untuk dijadikan skala prioritas sehingga tidak perlu dimasukkan dalam Rencana Prolegnas 2014.

### 4. Komnas Ham

- Mengenai kinerja dari Komnas HAM, sampai saat ini apakah Komisioner Komnas HAM masih memperlakukan fasilitas dan jabatan sehingga tidak memperhatikan kinerja. dan sudah meminta menambah honor lagi.
- Berkaitan dengan usulan kenaikan honor dan usulan tambahan anggaran, Komisi III DPR RI berharap agar Komnas HAM menyelesaikan masalah dan mengevaluasi internalnya terlebih dahulu.

- Anggota Komisi III meminta penjelasan Komnas HAM bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang awalnya sebesar Rp. 12 miliar dan turun menjadi Rp. 9 miliar.
  - Penjelasan terkait dengan hasil penyelidikan untuk kegiatan kasus pelanggaran HAM yang ditangani melalui mekanisme mediasi yang alokasi padahal anggarannya sebesar Rp. 2.070.431.000.
  - Komnas HAM meminta Komisi III untuk memperkuat kelembagaan Komnas perempuan dengan dukungan APBN dan mengurangi ketergantungan terhadap donor.
  - Penjelasan Sekjen Komnas HAM, ada kesalahan penulisan pada kasus pelanggaran HAM yang ditangani melalui mekanisme mediasi, target output bukan 1, tapi 157 kasus. 5 tahun berturut-turut, Komnas HAM mendapat WTP dari pemeriksaan BPK. Terkait pembagian yang tidak tepat antara Komnas HAM dengan Komnas Perempuan sudah disesuaikan.
5. Perlunya standarisasi dari mitra kerja terkait tugas pokoknya, misalnya standarisasi kendaraan nasional / personil / kantor dari masing-masing mitra kerja.
  6. Terhadap usulan penambahan anggaran diharapkan mitra kerja mencantumkan target sasaran yang ingin dicapai.

### **III. PENUTUP**

RDP Komisi III dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komnas HAM, Sekjen DPD, dan Ketua LPSK tidak mengambil kesimpulan / keputusan, RKA K/L Tahun 2014 yang sudah disampaikan oleh mitra kerja akan dibahas dalam Rapat Komisi (intern) III DPR RI, dan selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat ditutup pada pukul 13.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI,  
KETUA**

**GEDE PASEK SUARDIKA, SH, MH**